

ISSN : 1978-0362

JURNAL
SOSIOLOGI REFLEKTIF



Laboratorium Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

**JURNAL
SOSIOLOGI REFLEKTIF
Laboratorium Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Volume 9, Nomor 2, April 2015**

PENGELOLA JURNAL

Ketua Penyunting : Muryanti, MA
Sekretaris Penyunting : Puspo Reni Rahayu, S.Sos
Penyunting Pelaksana : Sulistyaningsih, M.Si,
Ahmad Zainal Arifin, P.Hd, Dr. Yayan Suryana,
Sekretariat : Beng Pramono, Arifiartiningih
Desain Sampul & Tata Letak : Kirman
Diterbitkan oleh : Laboratorium Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat Redaksi : Laboratorium Sosiologi,
Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jl. Marsda Adisucipto No.1, Yogyakarta
Telp (0274) 51957; Fax. (0274) 519571
Email: sosiologirefleksif@uin-suka.ac.id dan
sosiologirefleksif@gmail.com

Sosiologi Reflektif adalah jurnal yang dikelola oleh Laboratorium Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Media ini menekankan kajian seputar persoalan-persoalan sosial. Redaksi juga menerima tulisan seputar dinamika sosial baik yang bersifat teoritis, kritik, reflektif, opini, dan berbagai ide-ide dinamika sosial kemasyarakatan. Tulisan minimal 20 halaman kuarto, spasi ganda, dilengkapi dengan abstrak (Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia), catatan kaki, dan daftar pustaka. Penulis juga harus menyertakan nama lengkap bersama asal universitas atau lembaga profesional, alamat lengkap dan alamat email, nomor telepon, dan beberapa kalimat biografi penulis.

JURNAL SOSIOLOGI REFLEKTIF

DAFTAR ISI

Transmitting Charisma: Re-Reading Weber Through The Traditional Islamic Leader in Modern Java <i>Achmad Zainal Arifin</i>	1
Strategi Pengorganisasian Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama (LKNU) dalam Pengelolaan Program HIV/AIDS <i>Henri Puteranto</i>	31
Respon Masyarakat Desa Sitimulyo terhadap Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) Piyungan Bantul Yogyakarta <i>Sulistyaningsih</i>	49
Resistensi Petani terhadap Pertambangan Pasir Besi di Karangwuni Kulon Progo <i>Suliadi</i>	79
Identifikasi Rumah Tangga Rawan Bencana Gempa Bumi di Wilayah Kabupaten Bantul-DI Yogyakarta <i>Nurhadi</i>	103
Pendidikan Politik Koalisi Perempuan Yogyakarta Wilayah Yogyakarta 2000-2008 <i>Sri Roviana</i>	119
Sikap Penonton dalam Program Televisi Indonesia Saat Ini <i>Rahmat Edi Irawan</i>	139
Pengaruh Kepuasan Komunikasi terhadap Kinerja Pendidik IPDN Jatinangor <i>Yani Tri Wijayanti, Asep Suryana, Mien Hidayat, dan Funny Mustikasari</i>	155

Sosiologi Kaum Sufi: Sebuah Model Studi Integratif-Interkonektif <i>Dudung Abdurahman.</i>	175
Hegemoni Kriteria Estetik: Tinjauan Sosiologi Sastra atas Cerpen Pilihan Kompas dan Cerpen Kompas Pilihan <i>Adib Sofia.</i>	191
Pendidikan Damai: Upaya Mencegah Budaya Anarkisme Pendidikan <i>Muh. Syamsuddin.</i>	213
Islam dan Pekerjaan Sosial <i>Zulkipli Lessy.</i>	235
Pesantren dan Islam Indonesia: Kajian atas Pembaruan dan Peran Sosial Transformatif <i>Achmad Maulani.</i>	253
Aksi Kolektif dalam Bersepeda: Studi Banding Atas Sego Segawe (Sepeda Kanggo Sekolah Lan Nyambut Gawe) dan JLFR (Jogja Last Friday Ride) di Kota Yogyakarta <i>Mohamad Jamal Thorik.</i>	281
Dibalik Kekuatan Ideologi dan Kepentingan <i>Hendris.</i>	309

PENGANTAR REDAKSI

Assalamualaikum wr.wb.

Dinamika permasalahan umat Islam teramat luas dan menarik untuk dikaji, terkait dengan kelembagaan Islam yang masih eksis selama ini. Peran berbagai macam lembaga tersebut nampak dari upaya yang dilakukannya dalam menyelesaikan berbagai macam permasalahan sosial yang muncul saat ini, misalnya adanya permasalahan AIDS, kepemimpinan dalam konteks kekinian, isu kekerasan yang muncul dalam sistem pendidikan dan lainnya. Permasalahan tersebut akan dibahas di beberapa artikel Jurnal Sosiologi Reflektif Volume 9 Nomor 2, April 2015.

Achmad Zainal Arifin menulis tentang *Transmitting Charisma: Re-reading Weber through the Traditional Islamic Leader in Modern Java*. Artikel ini mencoba untuk menelaah kembali pandangan seorang tokoh klasik sosiologi, Max Weber, berkenaan dengan teori kepemimpinan beliau, lebih khusus lagi pandangan tentang karisma. Dalam hal ini, Weber berpandangan bahwa proses modernisasi, khususnya proses rasionalisasi yang tidak lagi bisa dibendung pengaruhnya, akan menyebabkan otoritas kharismatik akan berubah, terutama ke arah model legal-rasional. Keyakinan bahwa kualitas kharismatis, yang biasanya direpresentasikan oleh kekuatan supranatural, yang dalam pandangan Weber akan tererosi oleh proses modernisasi, justru semakin terinstitusionalisasi dalam dunia pesantren dan bahkan diyakini bisa ditransmisikan melalui institusi-institusi yang ada.

Henri Puteranto menganalisis tentang Strategi Pengorganisasian Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama (LKNU) dalam Pengelolaan Program HIV/AIDS. Penulis menjelaskan problematika pengelolaan program HIV/AIDS muncul ketika suatu organisasi sosial keagamaan menjalankan program ini. Organisasi keagamaan dituntut untuk mampu menjalankan program secara efektif. Namun demikian, dalam

implementasinya akan berhadapan dengan “*body of knowledge*” dari program HIV/AIDS. Menurutnya Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama sebagai organisasi sosial keagamaan mampu menjawab isu-isu sensitif di program HIV/AIDS untuk mengurangi stigma dan diskriminasi, membangun legitimasi organisasi dan mengelola manajemen pengetahuan secara efektif.

Artikel Respon Masyarakat Desa Sitimulyo Terhadap Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) Piyungan Bantul Yogyakarta ditulis oleh Sulistyaningsih. Penulis menjelaskan bahwa persoalan sampah, terutama persoalan sampah rumah tangga merupakan persoalan penting yang harus segera disikapi secara bijak. Selama ini pengelolaan sampah rumah dilakukan dengan *system sanitary landfill* yaitu sampah harus diolah, dipadatkan dan ditimbun setiap hari. Hal ini sesuai dengan Perda No 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut: *Pertama*, Pengelolaan TPA Piyungan yang berlokasi di Desa Sitimulyo sejak tahun 1995 sampai sekarang telah menimbulkan respon yang bervariasi dari masyarakat Desa Sitimulyo. Ada masyarakat yang merespon pro (setuju) terhadap pengelolaan TPA tersebut, namun ada juga yang kontra (tidak setuju) terhadap TPA. Perbedaan respon yang ada disebabkan karena ada masyarakat yang diuntungkan dan dirugikan adanya TPA di Desa Sitimulyo. *Kedua*, Kebijakan pemerintah Desa Sitimulyo terhadap pengelolaan TPA di Desa Sitimulyo lebih mengikuti aspirasi masyarakat.

Suliadi menulis Resistensi Petani Terhadap Pertambangan Pasir Besi di Karangwuni Kulon Progo. Tulisan ini menjelaskan perubahan sikap politik petani dalam menanggapi ekspansi kapitalisme pertambangan tidak lebih sebagai kompromi politik petani dalam merespon ekspansi tersebut. Menurutnya apa yang sesungguhnya hendak ditolak adalah cara-cara yang ditempuh para pemodal/perusahaan dan negara dalam melakukan ekspansi yang bias kapitalis yang hanya menciptakan masyarakat petani menjadi tersingkir terhadap akses sumber daya yang ada.

Nurhadi menulis artikel tentang Identifikasi Rumah Tangga Rawan Bencana Gempa Bumi di Wilayah Kabupaten Bantul-Di Yogyakarta. Faktanya, terdapat perbedaan daya tahan menyebabkan adanya perbedaan dampak bagi setiap rumah tangga yang mengalami bencana. Dampak bencana di daerah rawan bencana Bantul dapat dikategorikan sebagai berikut : (1) orang yang paling kaya menderita

paling sedikit bencana karena kemampuannya mengurangi dampak bencana dengan memperkuat rumahnya dan menggunakan asset yang dimilikinya, (2) penderitaan yang dialami, menjadikan orang miskin mampu mengurangi dampak dari kejadian bencana di masa depan untuk keberlangsungan hidupnya dengan memaksimalkan modal social sehingga meminimalkan biaya untuk membangun rumah dan (3) kelompok bertahan hidup yang paling rentan terhadap peristiwa bencana karena kekayaannya sudah habis untuk biaya rekonstruksi dan ketidakmampuannya mengurangi biaya buruh.

Sri Roviana menguraikan tentang proses Pendidikan Politik Koalisi Perempuan Yogyakarta Wilayah Yogyakarta 2000-2008. Penulis mejelkaskan bahwa perempuan Indonesia termarginalkan dalam proses pengambilan keputusan politik. Berbagai macam organisasi perempuan menyadari pentingnya pendidikan politik bagi perempuan, salah satunya organisasi KPI. Penulis menyimpulkan terhadap program yang dijalankan oleh KPI selama ini menunjukkan bahwa KPI Yogyakarta merupakan embrio dari gerakan sosial baru, akan tetapi pertumbuhan gerakan ini perlu menyingkirkan kelemahan yang muncul di tengah jalan: kesulitan membangun ideologi bersama, representasi politik yang ditunjukkan oleh organisasi elit, tidak adanya konsolidasi yang berbasiskan organisasi, ketergantungan kepada donor dan ketidakmandirian dan pembiayaan sukarela untuk menyelenggarakan pendidikan politik bagi perempuan.

Rahmat Edi Irawan menulis artikel tentang Sikap Penonton dalam Program Televisi Indonesia Saat Ini. Menurutnya saat ini mulai terjadinya pergeseran penonton pasif ke penonton aktif di industri televisi Indonesia. Jika pada masa lalu, banyaknya hambatan, seperti rezim pemerintahan yang represif, tidak adanya pilihan program dan stasiun televisi serta belum adanya regulasi dan regulator menyebabkan lamanya penonton televisi di Indonesia bersikap pasif. Sementara saat ini, pemberdayaan penonton melalui berbagai media dan upaya yang dilakukan KPI menyebabkan kondisinya sudah berubah, penonton mulai aktif bersikap. Hal itu ditunjukkan dengan meningkatkan sikap kritis mereka, dengan banyaknya melakukan pengaduan atas tayangan yang melanggar regulasi baik melalui KPI atau media massa lainnya.

Yani Tri Wijayanti, Asep Suryana, Mien Hidayat, Dan Funny Mustikasari menganalisis tentang Pengaruh Kepuasan Komunikasi terhadap Kinerja Pendidik IPDN Jatinangor. Hasil penelitian menunjukkan Komunikasi organisasi berpengaruh pada efektivitas

organisasi, salah satunya terkait kinerja. Terpenuhinya kebutuhan informasi dan komunikasi di dalam organisasi menimbulkan kepuasan komunikasi yang dapat meningkatkan kinerja dari karyawan, dalam tulisan ini adalah pendidik di IPDN Jatinangor. Ketika interaksi sosial yang meliputi kontak sosial dan komunikasi dalam organisasi berjalan dengan baik, maka hubungan antar anggota organisasi terkait dengan pekerjaan akan berjalan dengan baik, dan kinerja para anggota organisasi dapat meningkat dan tujuan organisasi dapat tercapai.

Sosiologi Kaum Sufi: Sebuah Model Studi Integratif-Interkonektif ditulis oleh Dudung Abdurahman. Penulis menjelaskan Kaum Sufi merupakan realitas sosial yang berbasiskan keagamaan pada komunitas-komunitas tarekat. Tarekat sendiri adalah salah satu bentuk implementasi keislaman yang bercorak esoterik, yang secara sosiologis biasa menampilkan aktivitasnya yang terstruktur dalam kelompok guru dan murid. Hubungan antara keduanya terjalin dalam sistem sosial yang konsisten terhadap moralitas dan spiritualitas masyarakat. Karena itu dinamika sosial Kaum Sufi dalam gerakan-gerakan tarekat itu selalu bercirikan : *pertama*, pengembangan doktrin sufi melalui sistem ritual berfungsi memperkuat solidaritas sosial para penganut tarekat. *Kedua*, peranan Kaum Sufi dalam bentuk hubungan dan partisipasi sosial di tengah kemajemukan masyarakat pada umumnya menampilkan model gerakan sosial yang unik, khususnya sumbangan mereka terhadap pembinaan spiritual dan moralitas publik di tengah-tengah perubahan sosial. *Ketiga*, tipologi gerakan sosial Kaum Sufi pada umumnya bersifat *inklusifme-pragmatis; eksklusifme-fundamentalis; dan fundamentalisme-pragmatis*.

Adib Sofia menulis artikel yang berjudul Hegemoni Kriteria Estetik: Tinjauan Sosiologi Sastra atas *Cerpen Pilihan Kompas* dan *Cerpen Kompas Pilihan*. Hegemoni merupakan konsep yang dikenalkan Gramsci untuk menganalisis bentuk-bentuk praktik politik, budaya dan ideologi. Pendekatan mendasarnya adanya hubungan yang kompleks dan non mekanik antara budaya dan politik. Gramsci mempertanyakan bentuk kebudayaan manakah yang menjadi budaya massa yang diproduksi kontemporer. *Cerpen Kompas Pilihan* (Cerita Pendek Pilihan *Kompas*) dan *Cerpen Pilihan Kompas* (Cerita Pendek Pilihan *Kompas*) merupakan kumpulan cerita pendek terbaik yang dimuat di harian *Kompas*, salah satu penerbit terkemuka. Mereka mempublikasikan secara periodik sejak tahun 1970 dan menjadi salah satu produk dari masyarakat.

Muh. Syamsuddin menjelaskan tentang Pendidikan Damai:

sebagai Upaya Mencegah Budaya Anarkisme Pendidikan. Penulis menegaskan bahwa kekerasan merupakan bentuk hegemonik dalam segala aspek kehidupan politik, ekonomi, sosial, hukum dan budaya. Termasuk dalam pendidikan dilakukan melalui proses dehumanisasi dari substansi dan metode pembelajaran. Metode pengajaran yang berlangsung selama ini dilakukan dengan pendekatan pedagogi atau seorang guru, menjadi figur yang sempurna (mengetahui tentang banyak hal) dan siswa hanyalah obyek. Tindakan ini disebut kekerasan pendidikan. Kekerasan ini dapat merusak kepribadian.

Islam dan Pekerjaan Sosial dianalisis oleh Zulkipli Lessy. Menurut Teologi Islam dan lima pilar Islam memiliki sejarah dan peran penting dalam pengembangan praktik pekerjaan sosial dan masyarakat Muslim. Beberapa efeknya dikaji dengan menggunakan review literatur dan melalui komparasi diantara masyarakat Muslim dan beberapa kelompok agama yang mengikutinya serta menguji teologi Muslim Shi'i dan Muslim Sunni. Konsep utama dari Islam, misalnya : syahadat, sholat, puasa, zakat dan haji seharusnya dijalankan oleh pekerja sosial Muslim dalam praktiknya dalam masyarakat Muslim.

Achmad Maulani menulis tentang Pesantren dan Islam Indonesia: Kajian atas Pembaruan dan Peran Sosial Transformatif. Penulis menegaskan Pesantren dan Nahdlatul Ulama (NU) dipahami sebagai pelopor utama Islam di Indonesia. Bukan hanya karena kelembagaan tradisionalnya sebagai rujukan dalam Islam, akan tetapi karena pengembangan pendidikan Islam yang menonjol serta pengembangan wacana keislaman. Perkembangannya akhir-akhir ini, kedua lembaga tersebut berkontribusi penting dalam membangun dialog antara nilai islam dan budaya lokal.

Artikel terakhir dalam kajian jurnal ini ditulis oleh Mohamad Jamal Thorik dalam tugas akhirnya yang berjudul Aksi Kolektif dalam Bersepeda: Studi Banding atas Sego Segawe (*Sepeda Kanggo Sekolah Lan Nyambut Gawé*) dan JLFR (*Jogja Last Friday Ride*) di Kota Yogyakarta. Kesimpulan dari penelitian menunjukkan perbedaan antara Sego Segawe dan JLFR pada pola sosialisasi yang dibagi menjadi 5 mekanisme sosialisasi : 1) imitasi: Sego Segawe menggunakan keteladanan Walikota dan Pegawai Balaikota, sedangkan JLFR menggunakan keteladanan komunitas sepeda; 2) instruksi: Sego Segawe menggunakan Surat Edaran (SE) sebagai himbauan bersepeda, namun aspek instruksi tidak terdapat pada JLFR; 3) desiminasi: Sego Segawe kurang memaksimalkan sarana komunikasi, sementara JLFR menggunakan sarana *social media* dengan

intens; 4) motivasi: Sego Segawe menunjukkan dukungan melalui *reward* kepada pelajar sebagai duta sepeda, sedangkan JLFR menggalang dana untuk pesepeda korban kecelakaan; 5) penataran, Sego Segawe mengalami inkonsistensi pada pelaksanaan kampanye secara parsial, sedangkan JLFR melaksanakan kampanye secara rutin.

Demikian gambaran secara umum jurnal yang akan sidang pembaca nikmati edisi ini. Semoga apa yang tertuang dalam kajian ini memberikan sumbangan yang berarti dan menjadi sumber pengetahuan baru. Selamat membaca. *Wallahu a'lam bi shawab.*

Wassalamualaikum wr. wb

Redaksi

PENDIDIKAN DAMAI: Upaya Mencegah Budaya Anarkisme Pendidikan

Muh. Syamsuddin

Dosen Metodologi Penelitian dan Peneliti Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat Email : -

Abstract

The violence has hegemonied all aspects of human life as in the politics, economic, social, law and education. Hegemony in the education field cause the dehumanization of the substance and the teaching methods. Educational methods developed during this time is a pedagogical approach or one direction that become a teacher as a perfect figure (knows about much matter) and the student as a object. This form is called the violence in education. This violence can result of split personality. This paper discusses the prevention of the violence occured in the education through peace education.

Key Words : Peace Education, Anarkhisme Culture, Hegemony and Education

Intisari

Kekerasan merupakan bentuk hegemonik dalam segala aspek kehidupan politik, ekonomi, sosial, hukum dan budaya. Hegemoni dalam pendidikan disebabkan oleh proses dehumanisasi dari substansi dan metode pembelajaran. Metode pengajaran yang berlangsung selama ini dilakukan dengan pendekatan pedagogi atau seorang guru, menjadi figur yang sempurna (mengetahui tentang banyak hal) dan siswa hanyalah obyek. Tindakan ini disebut kekerasan pendidikan. Kekerasan ini dapat merusak kepribadian. Tulisan ini mendiskusikan tentang upaya mencegah kekerasan yang terjadi dalam pendidikan melalui pendidikan damai.

Kata Kunci: Pendidikan Damai, Budaya Anarkhisme, Hegemoni dan Pendidikan

Pendahuluan

Keinginan untuk hidup secara damai dan harmoni telah menjadi perhatian banyak pihak. Di sisi lain, upaya untuk menyelesaikan kekerasan pun menemui tantangan yang semakin kompleks. Di satu sudut, terdengar teriakan “tolak pornografi dan pornoaksi!”; di sudut yang lain orang memprotes peperangan, membentangkan spanduk bertuliskan “no war!” dan menyerukan penyelesaian damai atas suatu konflik. Di satu sudut terdengar tuntutan untuk menghargai budaya orang lain, di sudut lainnya terdengar yel-yel nyaring untuk peduli lingkungan, “stop perambahan hutan!”; dan suara lantang menyerukan anti-korupsi, “seret koruptor ke pengadilan!”.

Kekerasan sudah sedemikian merajalela di seluruh aspek kehidupan. Dalam bidang politik, penjajahan dan perang adalah bentuk kekerasan; di bidang ekonomi, korupsi dan perampasan harta secara ilegal merupakan bentuk kekerasan; di bidang hukum, pelanggaran aturan adalah bentuk kekerasan; di bidang budaya, eksploitasi nilai-nilai negatif yang merusak peradaban merupakan bentuk kekerasan. Media massa juga dapat menampilkan tayangan kekerasan. Justru media massa ini yang seringkali mempercepat pembelajaran kekerasan. Bisa kita bayangkan, untuk menyajikan reklame sabun atau shampo yang berciri kelembutan dan kehalusan saja, justru disampaikan dalam bahasa kekerasan! Film kartun pun yang merupakan konsumsi kesukaan anak-anak, disajikan penuh dengan adegan baku hantam dan adu jotos. Demikian pula halnya dengan bidang pendidikan, bentuk-bentuk hukuman atau sanksi yang kelewat batas, penyalahgunaan wewenang, pemaksaan dan tekanan atau menyalahi kode etik dan norma kepatutan, juga disebut sebagai kekerasan.

Hierarki Kekerasan

Hebert Butterfield, seorang sejarawan, pernah mengatakan bahwa kekerasan dan kekejaman dalam sejarah manusia; selain merupakan fenomena umum, juga merupakan masalah yang sangat sering ditutupi. Karenanya ia menegaskan bahwa, “Salah satu agenda intelektual terbesar abad ini dan selanjutnya adalah studi tentang kekerasan dan isu-isu moral yang terlibat di dalamnya”¹. Arti penting studi tentang kekerasan dan kekejaman adalah untuk menyadari bahwa kekerasan

1 Robert Cribb (ed.), *The Indonesian Killing of 1965-1966: Studies from Java and Bali*, Monash Papers on Southeast Asia No. 21, 1990, hlm. 14.

adalah hal yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia—seperti tesis Freud yang mengatakan manusia mempunyai kecenderungan untuk berbuat jahat (*tanathos*), sekaligus menyadari bahwa kekerasan hanya akan menimbulkan kekerasan yang lebih tinggi intensitasnya.

Bahwa orang cenderung bertindak dengan kekerasan adalah sebuah masalah psikologi. Ia tidak mampu membawa diri secara normal, mengelola konflik-konfliknya secara biasa dan tidak sanggup lagi menangani tekanan-tekanan depresif-represif yang menyebabkan mental kejiwaannya menjadi labil dan akhirnya frustrasi. Ia sakit, sakit jiwa, sakit hati. Hati terus marah, misalnya karena orang itu merasa terus-menerus diperlakukan dengan tidak adil, tidak berdaya, atau karena menyaksikan ketidakadilan mencolok tanpa dapat berbuat apa-apa.

Budaya kekerasan sudah merupakan kenyataan dalam kehidupan bangsa Indonesia yang multikultur dan multi-etnik ini. Setiap gesekan atau konflik dapat berakhir dengan pembunuhan atau perkelahian massal. Di mana-mana ada tawuran, antara orang-orang biasa di desa-desa hingga antar warga kampung di tengah-tengah kota Metropolitan Jakarta. Kalau yang terlibat adalah orang dari suku atau agama berbeda, bisa terjadi perang suku atau perang agama.

Paling tidak ada empat faktor yang membuat masyarakat bertindak dengan kekerasan. *Pertama*, transformasi dalam masyarakat. Modernisasi dan globalisasi merupakan tekanan luar biasa yang membuat masyarakat kita berada dalam keadaan tegang terus-menerus. Proses transformasi budaya dari masyarakat tradisional ke pasca-tradisional dengan sendirinya menciptakan disorientasi, dislokasi, disfungsi yang terasa sebagai ancaman ekonomis, psikologis dan politis. Cara-cara pengelolaan konflik tradisional untuk menghadapi pluralisme dalam masyarakat tidak lagi mempan dan berjalan dengan efektif. Dengan sendirinya kecenderungan primordialistik ke dalam dan agresif atau keras ke luar bertambah ketika masyarakat tidak mengalami proses modernisasi sebagai proses positif yang meningkatkan rasa sejahtera dan keadilan.

Kedua, akumulasi kebencian dalam masyarakat. Kiranya tidak dapat disangkal juga bahwa ada tendensi-tendensi eksklusif, baik di kalangan agamawan, maupun di kalangan pemuka suku tertentu yang mempunyai efek provokatif cukup ampuh. Mengafirkan yang beragama lain dan mengajari anak agar mengambil jarak dari anak orang lain yang “kafir”, segala macam cerita tentang golongan atau kelompok lain tanpa

usaha untuk menjamin kebenarannya, memanasnya hubungan antar golongan, merupakan kenyataan yang sulit disangkal.

Ketiga, masyarakat yang sakit. Masyarakat diliputi budaya kekerasan di mana konflik-konflik sehari-hari tidak lagi mampu ditangani dengan baik, melainkan langsung merangsang kekerasan serta melibatkan komunitas yang bersangkutan sehingga mudah dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Titik sambung pluralitas bangsa Indonesia yang secara hakiki terdiri atas ratusan suku, etnik dan budaya yang menganut beberapa agama, tersebar atas ribuan pulau dengan mobilitas tinggi itu mulai retak.

Seakan-akan masyarakat terkena *atrofi* kemampuan bersolidaritas melebihi lingkungan primordial, suatu penyempitan fokus perhatian pada kelompok sendiri. Kemampuan untuk merasakan kebersamaan "kita sebagai bangsa" atau "kita sewilayah" digerogeti oleh perspektif "mereka" dan "kami", di mana "kami" semakin sempit dan "mereka" yang lain dirasakan sebagai ancaman. Idealnya, bangsa seperti itu hanya dapat bersatu apabila memiliki kemampuan psikis untuk bertoleransi, artinya untuk menerima tanpa stress keanekaan tradisi, gaya hidup, pergaulan, pandangan hidup dan kebiasaan religius.

Keempat, Orde Baru sebagai sistem institusionalisasi kekerasan. Semua konflik sosial dan kepentingan dipecahkan tidak secara rasional, tidak obyektif, menghilangkan dialog, tidak adil melainkan secara kekuasaan: kooptasi, intimidasi, ancaman, penindasan. Kebrutalan Angkatan Bersenjata sebagai corong peneguhan *status quo*-nya di mana pun mereka beraksi, dibarengi dengan mengkhotbahi masyarakat tentang nilai-nilai luhur "Pancasila", "rasa kebangsaan", "kesatuan dan persatuan", dan sebagainya, menambahkan sinisme dan rasa putus asa masyarakat.

Sebagai reaksi atas ideologisasi masyarakat di masa Demokrasi Terpimpin, pemerintahan Orde Baru melakukan kebijakan depolitisasi. Partai-partai politik dikebiri, kegiatan politik, bahkan pertemuan lebih dari lima orang dilarang. Sementara pembangunan diartikan: nasib rakyat diurus dari atas. Undang-undang Pemerintahan Daerah, struktur-struktur kepemimpinan lokal-tradisional yang sekaligus struktur-struktur kemandirian dihancurkan, sampai Kepala Desa pun menjadi wakil pemerintah pusat yang membantu dalam mengeksploitasi rakyatnya.

Dengan tertutupnya dimensi politik, perhatian masyarakat terfokus pada unsur-unsur primordial. Apa pun yang ditetapkan

“pemerintah” harus diterima oleh rakyat. Rakyat hanya bisa menyaksikan pembangunan mentereng yang bukan milik mereka secara frontal dan sporadis, sedangkan yang maju selalu “orang lain”. Pada saat yang sama rakyat semakin sering merasa menjadi korban pembangunan. Proyek Kedungombo hanyalah simbol bagi ratusan kejadian serupa. Rakyat harus terpaksa rela melepaskan rumah, tanah dan hutannya, dengan ganti rugi yang sudah tidak memadai sama sekali dan kemudian masih dikorupsi. Apabila rakyat berani menolak, mereka dituduh “PKI” atau “ekstrem kanan”. Ancaman dan intimidasi menjadi trend penyelesaian konflik di bawah rezim otoriter Orde Baru.

Maka yang terjadi adalah akumulasi rasa kecewa, marah, perasaan perlakuan tidak adil, kebencian dan dendam kesumat. Emosi-emosi itu dengan sendirinya menggumpal dan dilampiaskan kepada “yang lain”, “mereka”. “Mereka” itu bisa pemerintah, birokrasi, TNI, tentu masyarakat Tionghoa, tetapi juga suku lain, pendatang, atau penduduk asli, umat beragama lain dan lain-lain. Gelombang kekerasan individual dan kolektif, eksploitasi sukuisme, fanatisme agama, chauvinisme, tribalisme, bahkan kampungisme adalah akibat penindasan terstruktur terus-menerus itu.

Beranjak dari latar historis akar kekerasan tersebut, diperlukan adanya kesadaran multikulturalisme yang mengisyaratkan kesediaan menerima kelompok lain sebagai satu kesatuan, tanpa memperdulikan perbedaan budaya, etnik, gender, bahasa, ataupun agama². Kemajemukan dan keanekaragaman aspek kemanusiaan sebagai entitas personal yang unik, etnis, agama dan agama yang berbeda satu sama lain mengisyaratkan pula perlunya kerjasama antara semua elemen anak bangsa. Selain itu juga kesadaran multikulturalisme mengisyaratkan perlunya pemahaman secara khusus berdasarkan nilai-nilai kultural masyarakat setempat³.

Perilaku Kekerasan Pendidikan

Di sektor pendidikan, kesadaran multikultural membantu peserta didik mengerti, menerima dan menghargai orang dari suku, budaya, nilai, dan agama berbeda. Modelnya bukan dengan menyembunyikan

2 Mun'im A. Sirry, *Agama, Demokrasi, dan Multikulturalisme*, Kompas, 1 Mei 2003.

3 Ali Maksum dan Luluk Yunan Ruhendi, *Paradigma Pendidikan Universal di Era Modern dan Postmodern: Mencari “Visi Baru” atas “Realitas Baru” Pendidikan Kita* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2004), hlm. 244.

budaya orang lain, atau menyeragamkannya sebagai budaya nasional, sehingga budaya lokal menjadi luntur dan hilang. Dalam pendidikan multikultural diakui, tiap budaya mempunyai nilai kebenaran tersendiri yang membutuhkan pemahaman akan realtivitas nilai budaya⁴.

Pada hakikatnya tidak seorang pun menginginkan terjadinya kekerasan. Namun, fakta memperlihatkan hal yang sebaliknya, kekerasan terus berlangsung, bahkan cenderung meningkat. Ironisnya, kekerasan ternyata tidak melulu dimonopoli oleh perang dan kerusuhan massal, melainkan juga melanda dunia pendidikan, suatu wilayah yang diandalkan sebagai wahana insemnasi nilai-nilai moral, peradaban dan ilmu pengetahuan. Padahal menurut Clark Kerr, mantan Rektor Universitas California, sekolah atau pendidikan itu merupakan rancangan cetak biru (*blue print*) masyarakat masa depan. *What wrong with our education?* Apakah memang benar sinyalemen Roem Topatimasang, seorang praktisi pendidikan kerakyatan (*popular education*) dalam bukunya *Sekolah itu Candu* yang mengatakan bahwa sesungguhnya sekolah atau pendidikan itu sudah mati, karena ia tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya?

Jika ditelusuri lebih cermat, secara konseptual sistem pendidikan nasional kita memang sarat bias dan amat berpeluang untuk terjadinya proses dehumanisasi. Baik ditinjau dari sisi substansi material maupun segi metode pengajaran. Materi-materi pengajaran dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi sampai saat ini masih mengacu pada konsep *link and match*. Konsep ini seharusnya memiliki keluasan dan keluwesan makna, yaitu ketersambungan dan kemampuan mengatasi seluruh problem kehidupan.

Namun kenyataannya pendidikan nasional kita mereduksi dengan memaknai hanya sebatas sekolah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Materi-materi pelajaran dengan proporsi amat besar lebih diorientasikan pada kemampuan-kemampuan kognisi yang dianggap dapat menjadi “bekal kerja” pada suatu saat kelak. Tentu hal ini juga harus dianggap sebagai penanaman nilai materialistik pada taraf yang amat dini. Akibat dominasi materi “bekal kerja” tersebut, materi-materi tentang etika dan moral, yang diwakili oleh mata pelajaran agama, kesenian atau PPKN nyaris hanya menjadi pelajaran sampingan. Lebih parah, materi-materi yang sebenarnya berada pada wilayah pengembangan afeksi (sikap), secara latah berubah menjadi materi yang hanya menyentuh wilayah kognisi saja. Anak didik belajar agama

4 Paul Suparno, “Pendidikan Multikultural”, *Kompas*, 7 Januari 2003.

hanya untuk mengejar syarat kelulusan⁵. Sebuah modus yang amat materialistik sekaligus ironik. Bukankah materialisme adalah akar dari segala kekerasan di muka bumi?

Metode pendekatan pedagogis atau satu arah, yang menempatkan guru sebagai sosok yang paling tahu di satu sisi, sementara murid dianggap botol kosong yang tidak mengerti apa-apa masih menjadi pola pikir metodik yang paling umum. Segala sesuatu yang diungkapkan guru menjadi kebenaran yang tak terbantahkan. Pada titik inilah praktek indoktrinasi, ideologisasi dan hegemoni dalam kadar paling pekat, yang mencipta kesadaran-kesadaran palsu, telah dan sedang berlangsung.

Menjadikan anak didik sebagai obyek saja tentu tidak bijaksana, sebab menurut Paulo Freire, salah seorang tokoh pendidikan abad ini, tujuan akhir dalam upaya proses pendidikan adalah memanusiakan manusia (humanisasi) atau menjadikan manusia sesungguhnya. Hal ini selaras pula dengan ungkapan filosofis Freire yang disebut-sebut sebagai penggagas pendidikan liberatif tentang pentingnya pendidikan sebagai penyadaran. Menurutnya, pentingnya penyadaran ini karena manusia dalam dunia tidak sekedar “hidup” (*to live*), tetapi “mengada” atau bereksistensi. Dengan bereksistensi, manusia tidak hanya ada “dalam dunia”, melainkan juga “bersama dengan dunia”. Manusia sebagai eksistensi kata Freire, mampu berkomunikasi dengan dunia obyektif sehingga memiliki kemampuan kritis. Dengan penjelasan ini, nampaknya Freire ingin memberikan suatu afirmasi filosofis bahwa manusia pada dasarnya merupakan makhluk yang mempunyai kemerdekaan, sehingga manusia pada hakikatnya mampu melakukan transendensi dengan semua realitas yang mengitarinya⁶.

Dalam konteks ini, jauh sebelumnya Ki Hajar Dewantara sebenarnya juga telah mempunyai gagasan yang tidak saja cerdas di zamannya, tetapi juga untuk konteks masa kini. Ia menekankan praktik pendidikan yang menyokong kodrat alam anak didik, bukan dengan “perintah paksa”, tetapi dengan tuntunan, sehingga dapat menggugah perkembangan kehidupan peserta didik baik lahir maupun batin menurut kodratnya sendiri. Cara didik seperti ini disebut dengan pendekatan *among*. Dasar pemikiran pendekatan ini adalah: (a)

5 Abdul Munir Mul Khan, “Dunia Pendidikan sebagai Perang Kekerasan”, dalam Franz Magnis Suseno (ed.), *Melawan Kekerasan Tanpa Kekerasan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 168-169.

6 A. Malik Fadjar, “Pendidikan sebagai Praksis Humanisasi Aspek Kemanusiaan sebagai Basis Pembaharuan Paradigma Pendidikan Nasional”, dalam Said Tuhuleley (ed.), *Reformasi Pendidikan Muhammadiyah: Suatu Keniscayaan* (Yogyakarta: Pustaka Suara Muhammadiyah, 2003), hlm. 58-59.

Kemerdekaan sebagai syarat untuk menghidupkan dan menggerakkan kekuatan lahir dan batin; dan (2) Kodrat alam sebagai syarat untuk menghidupkan dan mencapai kemajuan dengan secepat-cepatnya dan sebaik-baiknya.

Sejatinya lembaga pendidikan (terutama formal) bisa menjadi tempat transfer ilmu pengetahuan dan budaya (peradaban). Seharusnya melalui praktik pedagogi, peserta didik diajak untuk memahami bagaimana pengalaman-pengalaman budaya dapat ditransformasi dalam zaman kehidupan yang akan mereka alami. Namun secara paradoksal, seringkali makna pengetahuan dan kebudayaan secara sistematis dan terlembaga justru diperebutkan oleh motif-motif politis penguasa maupun para birokrat pendidikan.

Dekadensi pendidikan itu tampak misalnya dari fakta bahwa selama Orde Baru, institusi pendidikan seperti sekolah telah menjadi bagian dari birokrasi pemerintah untuk mempertahankan kekuasaan dan kepentingannya. Lihatlah contoh, bagaimana Orde Baru memonopoli makna sejarah dengan memproduksi film G 30 S/PKI yang wajib ditonton siswa SD sampai SLTA dan ditayangkan tiap tahun di televisi. Artinya, ketika ilmu pengetahuan dan bagaimana proses menghasilkan dan mengembangkannya dibawa dalam kegiatan belajar mengajar maka selalu ada intervensi dan bias-bias politik dalam memperebutkan makna pengetahuan itu sendiri.

Selama beberapa dekade praksis pendidikan nasional kita tidak lagi bertumpu secara kukuh di atas pandangan yang holistik tentang manusia dan kemanusiaan. Oleh karena itu reformasi bidang pendidikan nasional lantas ditujukan untuk mempersiapkan masyarakat baru yang lebih ideal, yaitu masyarakat yang mengerti hak dan kewajiban serta berperan aktif dalam proses pembangunan bangsa. Esensi dan tujuan pendidikan nasional adalah proses menumbuhkan bentuk budaya politik (*a form cultural politics*) dalam perspektif tertentu yang mengacu pada masa depan yang jelas (Pembukaan UUD 1945 alinea 4). Melalui kegiatan pedagogis, gambaran tentang masyarakat yang ideal itu dituangkan dalam alam pikiran peserta didik sehingga terjadi proses inkulturasi dan akulturasi budaya. Pemikiran ini mengandung makna bahwa lembaga pendidikan sebagai tempat pembelajaran manusia memiliki fungsi sosial (agen perubahan di masyarakat) dan politik⁷.

Sayangnya, sistem pendidikan yang dijalankan di Indonesia masih parsial. Banyak pengamat mengatakan bahwa pendidikan di negeri ini

7 Surochman, "Renungan untuk Dunia Pendidikan", *Republika*, 11 April 2007.

salah urus, baik dalam tataran konsep dasar maupun konsep pengajaran. Konsep dasar pendidikan nasional yaitu membentuk manusia Indonesia seutuhnya. Kata 'seutuhnya' kalau boleh sedikit ditafsirkan adalah manusia yang memiliki kecakapan eksistensi diri (kecakapan hidup), kata hati (naluri), moral (etika) dan budi pekerti yang luhur (*akhlaqul karimah*). Dalam arti kata, pendidikan seharusnya bertelekan pada empat pilar pokok pengajaran sebagaimana yang termaktub dalam orientasi pendidikan versi UNESCO, yakni (1) *learning to know*, (2) *learning to do*, (3) *learning to be* dan (4) *learning to live together*.

Namun realitanya, konsep pengajaran yang kini berjalan lebih menekankan aspek kecakapan diri, keterampilan hidup atau kemampuan hitung-menghitung (matematika). Selama ini, proses pendidikan di Tanah Air memang terlalu menekankan aspek kognitif dan kurang memberi perhatian pada aspek afektif. Pengelolaan pendidikan di masa lampau yang memberikan penekanan berlebihan pada dimensi kognitif dan mengabaikan dimensi-dimensi lain, ternyata melahirkan manusia Indonesia dengan kepribadian pecah (*split personality*). Sebagai contoh, di satu sisi, betapa kehidupan beragama secara fisik berkembang sangat menggembirakan di seluruh lapisan masyarakat, namun di sisi lain dapat pula diamati betapa banyaknya perilaku masyarakat itu sendiri yang bertentangan dengan ajaran-ajaran agama yang dipeluknya. Indikasi yang paling nyata adalah dari para perilaku praktik KKN justru berasal dari kalangan pendidik.

Ini kontras dengan pendapat seorang pakar psikologi pendidikan, Benyamin Bloom yang menyatakan bahwa sekolah atau lembaga itu pada dasarnya berfungsi menggarap tiga wilayah kepribadian manusia yang disebutnya sebagai 'taksonomi pendidikan' yakni membentuk watak dan sikap (*affective domain*), mengembangkan pengetahuan (*cognitive domain*) serta melatih keterampilan (*psychomotoric* atau *conative domain*)⁸. Ibaratnya, generasi pendidikan masa kini sebagai penerus estafet bangsa adalah generasi yang tidak memiliki dimensi religiusitas secara seimbang atau dalam terminologi yang umum, kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Mestinya lembaga pendidikan adalah institusi yang melatih, menumbuhkan dan mempertajamnya.

Satu hal bisa menjadi catatan di sini, semua pihak diingatkan akan filsafat pendidikan dari Paulo Freire yang sebenarnya diadopsi dunia

8 Muhammad Zaenuddin, *Membangun Wacana Intelektual: Perspektif Keagamaan, Sosial-Kemasyarakatan dan Politik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 50.

pendidikan kita, yakni *what she/he will be*, bukan *what she/he is*. Bahwa pendidik harus mengembangkan kapasitas peserta didik untuk membuat mereka sadar akan keberadaannya di dunia. Prinsip humanisme harus dijunjung otentik, bukan humanitarian. Prinsip humanisme yang ada dalam UU Sisdiknas dimaksudkan untuk mencapai manusia Indonesia: bermoral, bermartabat dan berbudi luhur. Sedang untuk merealisasikan ketiganya, pendidikan haruslah dilaksanakan secara kritis-dialogis tanpa kekerasan.

Jika dihubungkan dengan masalah kekerasan dalam pendidikan sendiri, terdapat banyak hal yang membedakannya dengan kekerasan di medan perang atau kerusuhan massal. Namun, ditinjau dari pelaku, korban, kondisi, pemicu, motif serta resolusi konflik yang mungkin ditempuh, banyak hal dijumpai kesamaan tipologi di antara kedua wilayah tersebut. Persamaan yang paling mendasar adalah bahwa, perang, kerusuhan massal, ataupun kekerasan dalam pendidikan, terjadi karena ada pemicu (*precipitation*) antara pelaku dan korban atau pihak yang bertikai. Pemicu ini tidak mesti berupa sesuatu yang hebat atau besar, bahkan bisa karena hal-hal yang sepele. Di samping itu, pemicu bersifat spesifik dan kasuistik. Pemicu yang sama belum tentu mengakibatkan efek serupa pada pelaku dan korban atau kasus yang lain. Kekerasan yang ditimbulkannya bisa berangakai hingga berubah menjadi kekerasan tingkat berat, yakni tindakan kriminal. Bahkan, ketika pelaku, korban dan pemicu ini tidak dikelola dalam penyelesaian damai yang adil, maka sangat mungkin timbul kekerasan susulan.

Betapa pun, kekerasan dalam pendidikan harus segera dicegah dan dihentikan. Tindakan pencegahan (*preventive action* atau *saddzu al-dzari'ah*) secara mendasar berbeda dengan langkah-langkah resolusi konflik. Tindakan preventif berupaya meminimalisir kondisi, sedangkan resolusi konflik berupaya menyelesaikan kekerasan yang sudah terjadi. Kondisi (*condition*) merupakan *antecedent variable* yang mempengaruhi secara tidak langsung kemungkinan timbulnya perilaku kekerasan dalam pendidikan, baik secara internal maupun eksternal. Secara internal, pendidikan di Indonesia cukup memprihatinkan. Dari hal-hal fisik (seperti gedung sekolah yang rusak atau tidak layak pakai), angka *drop out* yang tinggi, rendahnya kesejahteraan guru, sampai dengan kurang memadainya sarana laboratorium dan perpustakaan.

Kondisi internal pendidikan merupakan faktor yang berpengaruh langsung pada perilaku pelajar/mahasiswa dan para pendidiknya, termasuk perilaku kekerasan. Menurut Merton, pendidikan yang salah

akan “mempengaruhi” guru dan anak didik kepada perilaku preman⁹. Sedang menurut pengamatan Djohar, pendidikan kita saat ini justru menghasilkan kenakalan remaja, kriminalitas, ketergantungan sosial dan disintegrasi bangsa¹⁰. Hal itu diperparah dengan kondisi eksternal pendidikan, baik sosial maupun budaya, yang pada kenyataannya telah mengalami pergeseran akibat modernisme. Seringnya pelajar dan mahasiswa terjerat dalam tawuran, narkoba, pornografi, miras dan pergaulan bebas, merupakan bagian dari kondisi eksternal akibat pergeseran sosial-budaya yang cukup pesat tersebut.

Modernitas telah membelah kesatuan dan memutus mata rantai kontinum realitas yang materiil hingga yang spiritual-metafisik. Pendidikan semata-mata didasari paradigma keterpilahan dunia materiil yang sekuler dan rendah dari dunia spiritual yang lebih sakral. Di sisi lain, pendidikan bukan sebuah paket pengembangan jiwa atau kepribadian hingga keterampilan, tetapi pemberian fasilitas kepada manusia untuk mengalami dan menyelesaikan sebanyak mungkin peristiwa sejarah. Singkatnya, kecerdasan bukan sekedar indikasi prestasi otak, tetapi juga prestasi spiritual dan religiusitas.

Di samping pengembangan intelektualitas, pendidikan perlu membekali diri untuk pembinaan hati nurani, jati diri, rasa tanggungjawab, sikap egaliter dan kepekaan normatif yang menyangkut makna nilai dan tata nilai. Pendidikan harus membantu anak didik untuk membentuk hati dan perasaannya. Pendidikan hendaknya juga mengajar anak didik berusaha mengendalikan dirinya sendiri, mengajar anak menjauhi rasa sombong dan merendahkan orang lain. Singkat kata, sekolah harus dengan sadar membina cipta, rasa dan karsa murid-murid. Sekolah harus melakukan pembinaan kognitif, afektif dan konatif secara simultan.

Pendidikan kiranya juga harus membekali generasi muda untuk mampu mengatasi pendangkalan hidup. Untuk itu, pendidikan perlu membantu anak didik untuk dapat memuliakan hidup (*ennobling life*). Di sini pendidikan ditantang tidak hanya membantu anak didik agar hidupnya berhasil, tapi lebih-lebih agar hidupnya bermakna. Oleh sebab itu, perlu adanya *the basics* dalam pendidikan sebagai bagian dari kegiatan pendidikan yang mempersiapkan anak-anak untuk mampu menjalankan kehidupan (*preparing children for life*), bukan sekedar

9 Guno Tri Tjahjoko, “Pendidikan dan Premanisme”, *Jawa Pos*, Rabu Pahing, 18 September 2002.

10 Lihat “Sistem Pendidikan Menyimpang Koridor”, *Jawa Pos*, Senin Pahing, 19 Agustus 2002.

mempersiapkan anak-anak untuk pekerjaan¹¹.

Dari sekian benang kusut pendidikan yang terurai semrawut di atas, kiranya hal itu mensyaratkan serta meniscayakan adanya sebuah frame pemikiran tentang pentingnya model pendidikan damai tanpa kekerasan (*non-violence/peace education*) yang hanya bisa dicapai bila konsep pendidikan nilai dikembangkan secara efektif berasaskan prinsip-prinsip persamaan hak dan kewajiban, kebebasan menyatakan pendapat dan sekaligus kemerdekaan berpikir dan bertindak sesuai pilihan kehendak hati nuraninya. Itulah sebabnya, konsep pendidikan harus memuat penerapan tujuan, materi, metode, model pembelajaran, kebijakan (*policy*) dan suasana belajar yang berwawasan damai dan perdamaian.

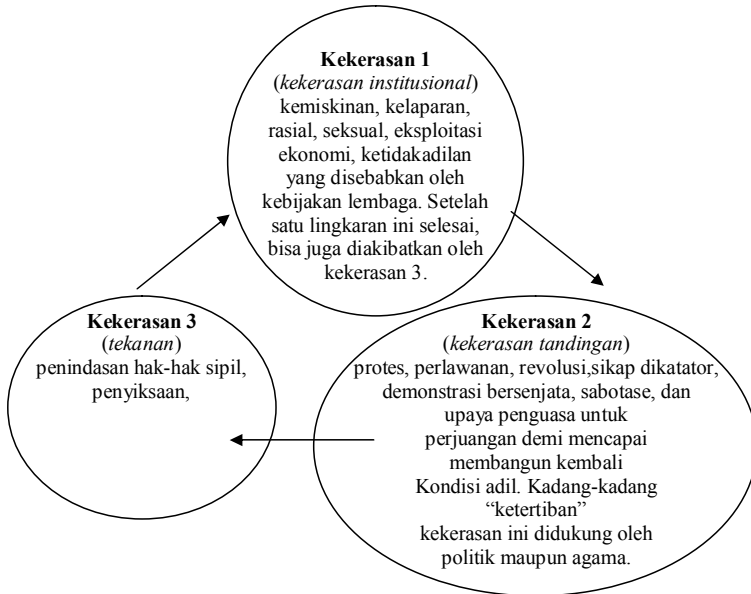
Gelombang globalisasi telah mengantarkan umat manusia kepada gugusan sistem kehidupan kosmopolitan di antara berbagai bangsa, budaya, agama, bahasa, ras, etnis, jenis kelamin, status sosial dan pluralitas. Ini berarti, bahwa pendidikan mestilah berpijak pada proses *learning to live together*. Untuk mendukung yang terakhir ini, nilai-nilai kemanusiaan universal, budaya, moral dan agama perlu diberdayakan, agar pendidikan menjadi humanistik. Agama, dalam hal ini Islam, amat sarat dengan muatan tuntunan untuk berkarakter positif dalam bentuk *akhlak al-karimah* sekaligus meninggalkan emosi negatif atau *akhlak al-madzmmumah*.

Keinginan untuk mencapai tujuan pendidikan yang damai dapat dilakukan antara lain dengan memahami penyebab kekerasan dalam masyarakat, yakni mengenal lebih dalam kondisi sosial yang bisa menyebabkan perilaku kekerasan dan mengkaji suasana kekerasan yang mampu menimbulkan perilaku kekerasan. Berkenaan dengan hal tersebut, berikut dikutip diagram spiral kekerasan yang dikemukakan oleh Dom Helder Camarra dalam menjelaskan tentang pola faktor penyebab kekerasan¹².

11 Mochtar Buchori, *Pendidikan Antisipatoris* (Yogyakarta: Kanisius, 2001), hlm. 41.

12 Dikutip dari Samson Prabhakar. "Towards an Education for Peace with Justice: Problems and Prospects" dalam *Bangalore Theological Forum*, (India: United Theological College, Vol. XXV No. 4 & Vol. XXV No. 1, Dec. 1993 & 7 March 1994), hlm. 46-48.

Skema 1: Spiral Kekerasan



Camarra menjelaskan bahwa spiral kekerasan bermula dari kekerasan ke-1 atau *kekerasan institusional*, yakni kekerasan yang ada dalam peraturan/kebijakan lembaga/sistem yang mendorong manusia ke arah kondisi yang tidak manusiawi, misalnya menerima penghinaan, ketidakadilan dan keadaan tanpa harapan. Kondisi ini ibarat hidup sebagai budak.

Kondisi kekerasan ini menimbulkan bentuk kekerasan ke-2, yakni *kekerasan tandingan* yang muncul sebagai reaksi terhadap kekerasan yang ke-1. Bentuk-bentuknya bisa berupa kerusuhan, revolusi, aksi terorisme dan tindakan kriminal. Kekerasan ke-3 adalah *tekanan atau kondisi tertekan (repression)* yang muncul sebagai respon atas kekerasan yang ke-2, yang sering menuntut kehadiran aparat polisi dan militer dalam jumlah yang banyak. Bentuk-bentuk kekerasan tersebut berputar menjalani siklus. Solusi atas suatu bentuk kekerasan bisa menimbulkan kekerasan bentuk lainnya yang lebih canggih, ibarat ‘muatan’ kekerasan yang muncul sebagai reaksi atas kondisi yang diterimanya. Hubungan kait-mengait ini menjadikan spiral kekerasan seolah tak berujung pangkal.

Untuk menghindari atau meminimalisir terjadinya perilaku kekerasan dalam pendidikan, tiap kasus yang muncul harus ditempuh alternatif solusi yang dapat disepakati oleh pihak-pihak terkait.

Penyelesaian yang tertunda, atau yang bersifat sementara, akan mendorong munculnya kekerasan susulan atau berantai. Memang sangat sulit untuk menetapkan bentuk atau pola solusi yang dapat diterima oleh semua pihak, karena penyelesaian suatu konflik pada dasarnya bersifat spesifik dan bahkan, kadangkala kasus itu sendiri terjadi secara insidental. Semua masalah tersebut perlu diatur secara tegas dalam hukum yang dilaksanakan secara konsisten.

Jika dikaitkan dengan realitas pendidikan kita akhir-akhir ini, mencuatnya kasus-kasus kekerasan di lembaga pendidikan semisal IPDN (dulu STPDN) maupun di lembaga pendidikan yang lain memberikan sinyal tentang semakin merebaknya gejala anarkisme (atau lebih tepatnya brutalisme) yang mengatasnamakan simbol-simbol berbau pendidikan, namun sebenarnya tidak berperikemanusiaan dan beradab sama sekali. Bahkan saking bobroknnya manajemen penyelenggaraan pendidikan di kampus para calon camat itu, Way-Kambas sebagai Sekolah Gajah dinilai masih lebih humanis daripada IPDN. Padahal, “murid-murid” di Way-Kambas bukan manusia tetapi binatang.

Fenomena tersebut menegaskan bahwa mendidik manusia ternyata tidak cukup hanya dilakukan dengan memberikan stimulus respon dalam *classical conditioning*, serta *reward* (ganjaran) kepada anak didik yang berhasil dan *punishment* (hukuman) bagi anak didik yang gagal sebagaimana yang dipahami oleh kaum behaviorisme seperti Ivan Pavlov dan BF Skinner. Manusia memiliki pikiran, perasaan, kreativitas, bakat bawaan yang jauh lebih sempurna. Sistem pendidikan behaviorisme yang diinterpretasi secara salah menyebabkan teori ini tidak dapat mengakomodasi potensi yang dimiliki oleh manusia, kecuali hanya instink¹³.

Konsep stimulus-respon diterapkan tanpa sentuhan hati nurani dan kasih sayang. Teknik-teknik yang digunakan persis sama dengan teknik untuk melatih binatang sirkus. Pertimbangan pikiran, perasaan, humanisme sama sekali tidak dikembangkan. Karena itu jika teori tersebut hendak diterapkan untuk mendidik manusia, biasanya hanya diterapkan untuk mengembangkan aspek keterampilan dasar. Teori pendidikan bagi manusia sudah jauh lebih berkembang sesuai dengan perkembangan kejiwaan manusia, seperti kognitifisme, nativisme, mentalisme dan konstruktivisme.

13 Pranowo, “IPDN Bukan Pusat Pelatihan Binatang”, dalam *Kedaulatan Rakyat*, Rabu Pon, 11 April 2007.

Oleh karena itu, agar tidak lagi berkuat dengan masalah-masalah krusial seputar dunia pendidikan di masa-masa mendatang, perlu kiranya menata kembali *platform* sistem pendidikan yang lebih modern dan humanis sesuai dengan kodrat manusia itu sendiri. Para ahli psikologi kognitif berpandangan bahwa proses belajar harus penuh makna (*meaningfull learning*), sehingga konsekuensi logisnya, mekanisme penyelenggaraan pendidikan mesti ditujukan pula untuk mengarahkan pola pikir berdasar nalar akal sehat menuju pola tindakan yang baik dan benar serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral maupun intelektual.

Dengan demikian, ide tentang pendidikan damai tanpa kekerasan (*non-violence/peace education*) yang dilandasi semangat toleransi dan solidaritas kemanusiaan universal menjadi keniscayaan sejarah dengan dibarengi secercah optimisme untuk merubah sekaligus mengikis budaya barbar pendidikan menuju tatanan horizon peradaban umat manusia yang lebih progresif dan egaliter serta senantiasa menjunjung tinggi harkat dan martabat antar sesama dengan berbagai tantangan dan prospeknya.

Di sinilah sebenarnya letak urgensi topik tulisan ini untuk menggali kembali di kedalaman pikir setiap insan pemerhati pendidikan sebagai wadah refleksi dan evaluasi kinerja struktural-kultural terhadap praksis dunia pendidikan kita yang selama ini mungkin cenderung bernuansa arogansi intelektual atau bahkan bergaya militeristik yang tidak mengindahkan norma-norma etis pendidikan yang seyogyanya memanusiaikan manusia menuju taraf pemahaman yang lebih mencerahkan dan memerdekakan. Secara khusus, tulisan ini memiliki arti penting, *pertama*, mengidentifikasi kondisi, faktor, pemicu atau modus perilaku kekerasan yang terjadi di (sebagian) lembaga pendidikan di Indonesia. *Kedua*, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi upaya pengembangan pola pendidikan afektif dan humanis yang relevan dengan kondisi sekarang. *Ketiga*, menjadi acuan bagi pihak berwenang untuk menetapkan kebijakan pendidikan di masa mendatang.

Resolusi Konflik menuju *Peace Building*

Kekerasan dalam pendidikan merupakan perilaku melampaui batas kode etik dan aturan dalam pendidikan, baik dalam bentuk fisik maupun pelecehan atas hak seseorang. Pelakunya bisa siapa saja: pimpinan sekolah, guru, staf, murid, orang tua atau wali murid, bahkan

masyarakat¹⁴. Kekerasan dalam pendidikan diasumsikan terjadi sebagai akibat kondisi tertentu yang melatarbelakanginya, baik faktor internal dan eksternal dan tidak timbul secara begitu saja, melainkan dipicu oleh suatu kejadian. Kondisi (*antecedent variable*), faktor (*independent variable*) dan pemicu (*intervening variable*) tindak kekerasan dalam pendidikan (*dependent variable*) terangkai dalam hubungan yang bersifat spiral, dapat muncul sewaktu-waktu, oleh pelaku siapa saja yang terlibat dalam dunia pendidikan, sepanjang dijumpai adanya pemicu kejadian.

Menurut Eric Hoffer, pemicu kekerasan utamanya adalah hal-hal mempersatukan gerakan massa, seperti rasa benci kolektif, perilaku meniru rekannya, bujukan pihak tertentu, karena ajakan pemimpin atau yang ditokohkan, karena adanya aksi pembuka kekerasan, adanya unsur kecurigaan dan upaya penggalangan atau persatuan massa. Sedangkan unsur pendorong timbulnya aksi bersama adalah keterikatan dengan kelompok (*gank, club* dan sebagainya), perilaku pura-pura atau bergaya, frustrasi atau meremehkan kondisi masa kini, unsur *supranatural* atau “hal yang tak nampak/ada”, doktrin yang diyakininya dan karena karakter gerakan massa itu sendiri¹⁵. Untuk mencegah terulangnya kekerasan, ditawarkan solusi yang berupa penanaman nilai-nilai agama, budaya, pendidikan afektif dan humanisasi pendidikan yang pro-perdamaian serta anti kekerasan (*non-violence/peace education*).

Khusus mengenai pendidikan damai tanpa kekerasan ini, secara khusus UNICEF (*United Nations International Children's Emergency Fund*) dan UNESCO (*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*) proaktif menyuarakan pendidikan damai. Dalam Seri Lembar Kerja UNICEF Juli 1999 tentang pendidikan damai, disebutkan bahwa dalam urusan persekolahan dan lembaga pendidikan, pendidikan damai dimaksudkan untuk hal-hal berikut:

1. Berfungsi sebagai “zona damai” di mana anak-anak merasa aman dari konflik kekerasan.
2. Melaksanakan hak dasar anak sebagaimana digariskan dalam Konvensi Hak Anak (CRC).
3. Mengembangkan iklim belajar yang damai dan perilaku saling menghargai antar anggota masyarakat.

14 A. Ridwan Halim, *Tindak Pidana Pendidikan (Suatu Tinjauan Filosofis-Edukatif)*, (Jakarta: Ghalia, 1985), h. 105. Lihat juga Abd. Rahman Assegaf, *Tindak Pidana Pendidikan dalam Asas-asas Hukum Pidana Indonesia (Suatu Tinjauan Yuridis Edukatif)*, (Jakarta: Ghalia, 1985), hlm. 28.29.

15 Eric Hoffer, “The True Believer”, dalam Masri Maris (terj.), *Gerakan Massa* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1988), hlm.36.

4. Menunjukkan prinsip persamaan dan tanpa diskriminasi baik dalam praktik maupun kebijakan administrasinya.
5. Menjabarkan pengetahuan tentang bentuk perdamaian yang ada di tengah masyarakat, termasuk berbagai sarana yang menyangkut adanya konflik, secara efektif, tanpa kekerasan, dan berakar dari budaya lokal.
6. Menangani konflik dengan cara menghormati hak dan martabat pihak yang terlibat.
7. Memadukan pemahaman tentang damai, HAM, keadilan sosial dan berbagai isu global melalui sarana kurikulum.
8. Menyediakan forum diskusi tentang nilai damai dan keadilan sosial.
9. Memanfaatkan metode belajar mengajar yang menekankan pada partisipasi, *Cupertino*, *problem solving* dan lainnya yang dapat menghargai perbedaan.
10. Memberdayakan anak agar dapat mengamalkan perilaku damai dalam lingkungan pendidikan dan di masyarakat pada umumnya.
11. Memperluas kesempatan untuk melakukan refleksi berkelanjutan dan pengembangan keahlian semua pendidik sehubungan dengan isu perdamaian, keadilan dan hak-hak seseorang.

Pendidikan damai merupakan proses pendidikan yang memberdayakan masyarakat agar mampu memecahkan konflik dengan cara kreatif dan bukan dengan cara kekerasan. Dalam konteks ini, pendidikan damai menjadi sangat terkait dengan tingkat kepuasan masyarakat. Kesulitannya adalah tatkala cara kreatif yang ditempuh tidak menjadikan masyarakat puas dalam penyelesaian konflik. Memang, cara kreatif kadangkala dipandang tidak menampakkan kejantanan, rasa jagoan dan semangat heroisme, yang kemudian mendorong penyelesaian konflik dengan jalan kekerasan. Cara kreatif dalam menyelesaikan konflik biasanya memerlukan waktu lebih lama, membutuhkan kesabaran, kedewasaan emosional, untuk menghasilkan *win-win solution* serta kedamaian¹⁶.

Keberhasilan pendidikan damai tidak ditunjukkan oleh angka-angka, melainkan mengacu pada kualitas kompetensi untuk merespon kesulitan hidup yang dihadapi bersama. Pendidikan damai memadukan beragam tradisi pedagogi dan teori-teori pendidikan secara bersamaan, sambil mengembangkan inisiatif untuk memajukan manusia melalui proses belajar. Pendidikan damai dilakukan secara dinamis,

¹⁶ Djohar, *Pendidikan Strategik: Alternatif untuk Pendidikan Masa Depan* (Yogyakarta: LESFI, 2002), hlm. 106.

interdisipliner dan multikultural. Upaya demikian sebenarnya, telah cukup lama dilakukan oleh para tokoh pendidikan terdahulu. Sebut saja misalnya John Dewey, Maria Montessori, Paulo Freire, Johan Galtung, Ellese, Kenneth Boulding, dan lain sebagainya.

Dalam pendidikan damai, kondisi damai dipahami tidak sekedar sebagai tiadanya bentuk-bentuk kekerasan langsung, melainkan juga terwujudnya kondisi damai yang positif. Pendidikan damai dengan demikian mencakup seluruh aspek dalam perdamaian. Pendidikan damai diarahkan untuk menumbuhkan tiga aspek utama—pengetahuan (*knowledge* sebagai *cognitive domain*, keterampilan (*skill*) sebagai *psychomotoric domain* dan sikap (*attitude*) atau *affective domain*—yang untuk mengembangkan budaya damai secara global.

Penjabaran tentang materi dan metode dalam pendidikan damai adalah sebagai berikut. *Pertama*, pendidikan damai memuat materi pengetahuan (*knowledge*) yang meliputi mawas diri, pengakuan tentang prasangka, berbagai isu lainnya seperti konflik dan perang, damai dan tanpa kekerasan, lingkungan dan ekologi, nuklir dan senjata lainnya, keadilan dan kekuasaan, teori resolusi, pencegahan dan analisa konflik, budaya, ras, gender, agama, isu HAM, sikap tanggungjawab, pengaruh globalisasi, masalah buruh, kemiskinan dan ekonomi internasional, hukum internasional dan mahkamah keadilan, PBB, instrumen, standar dan sistem internasional, perawatan kesehatan, masalah AIDS dan jual beli obat terlarang. *Kedua*, muatan materi keterampilan (*skill*) dalam pendidikan damai meliputi komunikasi, kegiatan reflektif dan pendengaran aktif, kerjasama, empati dan rasa harus, berpikir kritis dan kemampuan *problem solving*, apresiasi nilai artistik dan estetika, kemampuan menengahi sengketa, negosiasi dan resolusi konflik, sikap sabar dan pengendalian diri, menjadi warga yang bertanggungjawab, penuh imajinasi, kepemimpinan ideal dan memiliki visi. *Ketiga*, muatan materi nilai atau sikap (*attitude*) dalam pendidikan damai meliputi: kesadaran ekologi, penghormatan diri, sikap toleransi, menghargai martabat manusia beserta perbedaannya, saling memahami antar budaya, sensitif gender, sikap peduli dan empati, sikap rekonsiliasi dan tanpa kekerasan, tanggungjawab sosial, solidaritas, resolusi berwawasan global.

Di ruang kelas, pendidikan damai diarahkan untuk mengembangkan keterampilan, sikap dan pengetahuan anak melalui metode belajar partisipatoris dan kooperatif, serta suasana saling toleransi, peduli dan menghargai. Melalui kegiatan dialog dan

eksplorasi, guru bersama murid melakukan petualangan belajar kreatif. Para peserta didik ditumbuhkan dan diberdayakan untuk mampu berperilaku yang bertanggungjawab atas perkembangan diri dan prestasi mereka sendiri, sedangkan para guru memelihara kedamaian seluruh peserta didik. Pelaksanaan pendidikan damai merupakan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan menyeluruh para peserta didik, memajukan keadilan bersama dan perlakuan yang sama di antara remaja, serta meningkatkan tanggungjawab individu maupun sosial baik bagi para pendidik maupun peserta didiknya. Melalui bimbingan dan aksi sosial ini, para pendidik damai mendemonstrasikan bahwa masih ada banyak alternatif selain kekerasan. Bahkan Magnus Haavelsrud, seorang pendidik damai asal Norwegia, berpendapat bahwa tak ada satu jawaban sederhana tentang bagaimana pendidikan dapat memberi kontribusi bagi perlucutan senjata dan pembangunan dunia. Namun meningkatnya kesadaran melalui pendidikan, agaknya dapat menjadi penunjuk jalan bagi mobilisasi perdamaian yang diperlukan.

Dengan memusatkan pada pengembangan kemampuan para peserta didik seperti itu, pendidikan damai menjadi relevan dalam berbagai latar belakang pendidikan yang berbeda, dari daerah pedesaan hingga perkotaan, dari pengelolaan pendidikan berbasis sekolah hingga manajemen pendidikan berbasis masyarakat, serta bagi kurikulum formal maupun non-formal. Secara lebih luas, melalui konteks sosial, budaya, ekonomi dan politik masing-masing para pendidik dapat membentuk materi dan metode yang spesifik dalam upaya pendidikan damai ini sehingga inti pengetahuan, keterampilan dan sikap dapat bervariasi dan berkesesuaian dengan berbagai lingkungan pendidikan. Para guru umumnya memasukkan pendidikan damai ke dalam mata pelajaran tradisional, seperti sastra, matematika, sains, sejarah, bahasa, kewarganegaraan dan seni.

Pendidikan damai tidak mengajarkan peserta didik bagaimana cara berpikir *an sich*, melainkan bagaimana berpikir kritis. Dalam konteks ini mungkin pula terjadi konflik antara pendekatan partisipatoris dan holistik dengan kurikulum yang dirancang secara tradisional atau sekolah dengan aturan standar yang kaku. Namun perlu disadari bahwa pendidikan damai tidak bertujuan untuk mereproduksi melainkan melakukan transformasi. Dalam hal ini perlu kiranya mencermati pendapat John Dewey bahwa di dalam pendidikan damai terdapat banyak orang yang secara sadar berjuang untuk mendidik generasi mendatang bukan untuk masalah negara saat ini, tetapi memungkinkan

masa depan kemanusiaan yang lebih baik.

Salah satu cara untuk mengatasi tantangan pendidikan damai adalah membangun jembatan untuk mendukung setiap pihak sebagai pelaku utama. Sama halnya belajar memerlukan tempat dalam konteks sosial yang lebih luas, terutama di sekolah dan ruang kelas, begitu pula halnya dengan pendidikan damai, ia bergantung pada keluarga, masyarakat dan jaringan sosial, sehingga dapat menimbulkan efek perubahan yang positif dan berkelanjutan. Ungkapan *think globally, act locally* menjadi intisari bagi upaya mendidik budaya damai yang dapat menghubungkan antara teori dengan praktik, serta menerjemahkan isu internasional ke dalam perilaku individual. Seorang pendidik damai pun tidak harus bekerja sendiri, sebab masyarakat internasional bergerak secara aktif dan tumbuh melalui berbagai jaringan, terbitan berkala, kampanye global, program nasional maupun internasional. Masyarakat yang peduli, para pendidik dan para aktivis dari berbagai usia di seluruh penjuru dunia saat ini sedang gencar mempromosikan dan membangun perdamaian lewat jalur pendidikan.

Penutup

Pendidikan damai disamping memiliki materi dan metode sebagaimana disebutkan di atas, juga memiliki model instruksional yang dapat diaplikasikan untuk semua jenjang pendidikan. Model pendidikan damai ini dimaksudkan sebagai acuan bagi proses pembelajaran yang sedang dilakukan. Untuk menerapkan model pembelajaran pendidikan damai ini, yang diperlukan adalah mengolah kelas, melakukan interaksi belajar mengajar, menyampaikan materi dan metode dengan menerapkan pendekatan humanistik (*humanistic approach*). Di antara pendidik dengan peserta didik didorong untuk melakukan komunikasi multi-arah sehingga tercipta suasana demokratis di dalam kelas dan tidak didominasi oleh peran guru secara berlebihan. Untuk melaksanakan model instruksional pendidikan damai tersebut, tentunya perlu disiapkan beberapa fasilitas sederhana, seperti ruang belajar yang fleksibel dan suasana yang kondusif. Dan akhirnya, dengan kondisi damai yang positif melalui pendidikan nilai (afektif) yang humanis ini diharapkan akan terwujud kehidupan yang makmur, keadilan sosial, kesetaraan gender, terjaminnya hak-hak asasi manusia secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Daftar Bacaan

- as-Sakandar, al-Hikam Ibnu Athaillah.(2003).*Indahnya Tasawuf*, terj. Cholil Bisri, Yogyakarta : Penerbit Pustaka Alief.
- Assegaf, Abd. Rahman.(1985).*Tindak Pidana Pendidikan dalam Asas-asas Hukum Pidana Indonesia (Suatu Tinjauan Yuridis Edukatif)*. Jakarta: Ghalia.
- Buchori, Mochtar.(2001). *Pendidikan Antisipatoris*. Yogyakarta: Kanisius.
- Cribb, Robert (ed.). (1990). *The Indonesian Killing of 1965-1966: Studies from Java and Bali, Monash Papers on Southeast Asia No. 21*, 1990.
- Djohar.(2002).*Pendidikan Strategik: Alternatif untuk Pendidikan Masa Depan*. Yogyakarta: LESFI.
- Halim, A. Ridwan.(1985).*Tindak Pidana Pendidikan (Suatu Tinjauan Filosofis-Edukatif)*. Jakarta: Ghalia.
- Hoffer, Eric.(1988). *The True Believer*, dalam Masri Maris (terj.), *Gerakan Massa*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kemmis, S. dan McTaggart, R. (1988). *The Action Research Planner*. Victoria: Deakin University.
- Maksum, Ali dan Ruhendi, Luluk Yunan.(2004).*Paradigma Pendidikan Universal di Era Modern dan Postmodern: Mencari "Visi Baru" atas "Realitas Baru" Pendidikan Kita*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Prabhakar,Samson.(1994).*Towards and Education for Peace with Justice: Problems and Prospects, Bangalore Theological Forum, India: United Theological College, Vol. XXV No. 4 & Vol. XXV No. 1. Dec. 1993 & 7 March 1994.*
- Pranowo.(2007). *IPDN Bukan Pusat Pelatihan Binatang*, dalam *Kedaulatan Rakyat*, Rabu Pon, 11 April 2007.
- Simuh.(1996).*Tasawuf dan Perkembangannya dalam Islam*.Jakarta: Rajagrafindo.
- Sirry,Mun'im A.(2003). *Agama, Demokrasi, dan Multikulturalisme. Kompas*, 1 Mei 2003.
- Surohman.(2007). *Renungan untuk Dunia Pendidikan, Republika*, 11 April 2007.
- Suparno, Paul.(2003).*Pendidikan Multikultural, Kompas*, 7 Januari 2003.
- Suseno, Frans Magnis (ed.).(2000).*Melawan Kekerasan Tanpa Kekerasan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syukur,Amin.(2003).*Tasawuf Kontekstual Solusi Problem Manusia Modern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tjahjoko,Guno Tri.(2002). *Pendidikan dan Premanisme*. Jawa Pos, Rabu Pahing, 18 September 2002.

Tebba, Sudirman. (2004). *Kecerdasan Sufistik Jembatan Menuju Makrifat*, Jakarta : Kencana.

Tuhuleley, Said (ed.). (2003). *Reformasi Pendidikan Muhammadiyah: Suatu Keniscayaan*. Yogyakarta: Pustaka Suara Muhammadiyah.

Zaenuddin, Muhammad. (2004). *Membangun Wacana Intelektual: Perspektif Keagamaan, Sosial-Kemasyarakatan dan Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

_____. (2004). *Pendidikan Tanpa Kekerasan: Tipologi Kondisi, Kasus dan Konsep*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

_____. (2002). *Sistem Pendidikan Menyimpang Koridor*. Jawa Pos, Senin Pahing, 19 Agustus 2002.